



**NAMA MEDIA** : Jawa Pos Metropolis  
**TANGGAL** : 26 Oktober 2023  
**KATEGORI** : Hukum Pidana

## Dorong Politik Dibiayai Publik agar Tak Korupsi

JAKARTA- Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, bicara terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Sudirman ingin pendanaan partai politik masuk dalam anggaran negara supaya menekan tingkat korupsi di partai-partai.

"Pendanaan partai politik, agenda lama, butuh keberanian. Kita semua berhitung, 1% dari APBN saja Rp 3T. Rp 3T lebih dari cukup biaya politik," kata Sudirman dalam acara seminar Indonesia Integrity Forum 2023 di Mandarin Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Ia mengatakan apakah politik tak lebih penting dari lembaga setingkat birokrat atau kepolisian. Menurutnya dengan pendanaan

itu akan menciptakan efisiensi daripada partai harus berjalan dengan biayanya masing-masing.

"Apa politik tidak lebih penting dari tentara, birokrat, polisi? Sebenarnya lebih penting karena di hulu. Waktu rekrut tentara, pegawai negeri, polisi, bina mereka, dengan uang negara. Kenapa tidak? Kita ingin dorong politik publik money karena ini akan ke mana, punya strategis dan itu efisien daripada kita biarkan politik masing-masing," ucapnya.

Sudirman mengatakan Anies akan mendorong UU Perampasan Aset sebagai efek jera. Pihaknya

akan memulihkan peran KPK di masa mendatang.

"Kembalikan fungsi KPK pada masanya sebagai instrumen percepat, tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan," kata Sudirman.

"Kita punya tujuh lembaga tinggi. Lima dari tujuh pimpinan lembaga masuk penjara dalam 10 tahun ini. Apa yang buat jenderal aktif dagang narkoba bertahun-tahun lamanya? Ini kita renungkan," sambungnya.

Sudirman yakin Anies mampu memilih tim kabinet tanpa didominasi penuh parpol. Ia menyinggung di awal pemerintahan Presiden Jokowi di mana menteri-menteri kabinet terseleksi secara ketat. (drc/muz)